

IMPLEMENTASI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA TELUK SARI KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Muhammad Raihan¹, Munawarah², M.Ridha Anshari³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: yayanraihan026@gmail.com

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan menurunkan angka kemiskinan masyarakat. Di Desa Teluk Sari, Kecamatan Amuntai Selatan, BUMDes beroperasi secara aktif berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, khususnya Pasal 22 ayat (2), yang mengamanatkan agar pemerintah daerah, baik Provinsi Kalimantan Selatan maupun pemerintah kabupaten/kota, memberikan pembinaan, sosialisasi, pelatihan teknis, pengembangan manajemen dan SDM, serta dukungan dalam hal permodalan. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa permasalahan pada BUMDes di Desa Teluk Sari, antara lain kurangnya komunikasi yang jelas serta transparansi informasi mengenai pendapatan BUMDes, rendahnya kedisiplinan pengelola, dan belum adanya sistem inventarisasi yang memadai. Selain itu, BUMDes belum memiliki sistem pencatatan dan pemantauan stok alat tulis kantor (ATK) yang efektif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dengan jumlah sebanyak 11 orang. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan keabsahan data, dilakukan uji kredibilitas melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, penggunaan referensi, serta teknik member check.

Hasil penelitian Implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada desa Teluk Sari dapat dikatakan masih belum terimplementasi dengan baik. pada sub variabel komunikasi, penyaluran komunikasi sudah cukup baik. kejelasan komunikasi sudah baik, konsistensi perintah sudah cukup baik. Kedua pada sub variabel Sumberdaya, pada indikator staf kurang baik. Pada indikator informasi sudah baik. wewenang masih kurang baik, dan fasilitas masih kurang baik. Ketiga pada sub variabel disposisi, pengangkatan kurang baik. insentif (gaji) kurang baik. Keempat pada sub variabel struktur birokrasi, Standard Operating Procedures (SOP) sudah baik. fragmentasi (tanggung jawab) cukup baik. Faktor penghambat antara lain, staf kurang kompeten di bidangnya dan fasilitas yang kurang memadai. Faktor pendukung antara lain, kesesuaian usaha yang dikelola dengan potensi Desa Teluk Sari dan pelaksanaan program BUMDes Teluk Sari sudah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Disarankan Kepada Pemerintah Desa Teluk Sari, sebaiknya dapat memberikan pelatihan kepada para pelaksana program BUMDes agar mereka dapat lebih paham mengenai usaha yang dikelola Kepada pengawas BUMDes Teluk Sari, sebaiknya lebih dapat mengawasi lagi proses pelaksanaan implementasi program BUMDes pada desa Teluk sari.

Kata Kunci: Implementasi BUMDes

ABSTRACT

The establishment of Village-Owned Enterprises (BUMDes) is expected to attract community involvement and gradually reduce poverty levels. The BUMDes in Teluk Sari Village, Amuntai Selatan District, is actively operated based on Government Regulation No. 11 of 2021

concerning Village-Owned Enterprises, Article paragraphs (1) and (2), which state that regional governments, including both the South Kalimantan Provincial Government and Regency/City Governments, must conduct socialization, guidance, technical training, management and human resource development, and provide access to capital acceleration.

However, the implementation of the BUMDes program in Teluk Sari Village faces several challenges: lack of communication clarity and transparency regarding BUMDes income, lack of discipline among BUMDes managers, and the absence of an effective inventory system. Additionally, the BUMDes lacks an adequate recording and tracking system for office supplies.

This study uses a descriptive qualitative approach. The types of data used are primary and secondary data. The data sources were selected using purposive sampling, involving 11 informants. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques involve data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Data credibility was tested through prolonged engagement, increased persistence, triangulation, negative case analysis, reference materials, and member checking.

The findings indicate that the implementation of the BUMDes program in Teluk Sari Village has not been carried out optimally. In the communication variable, message delivery is quite good, clarity is sufficient, and command consistency is moderate. In the resource variable, staff performance is poor, information access is good, authority is lacking, and facilities are inadequate. In the disposition variable, the appointment process and incentives (salaries) are considered poor. In the bureaucratic structure variable, Standard Operating Procedures (SOPs) are in place, and fragmentation (responsibility) is moderate.

Inhibiting factors include unqualified staff and insufficient facilities. Supporting factors include the suitability of the business with the potential of Teluk Sari Village and the implementation of SOPs in BUMDes operations.

It is recommended that the Teluk Sari Village Government provide training for BUMDes program implementers to improve their understanding of business operations. Furthermore, BUMDes supervisors should enhance their oversight of the program's implementation in the village.

Keyword: *Implementation of BUMDes*

PENDAHULUAN

Kemandirian daerah menjadi salah satu tuntutan utama pemerintah pusat saat diberlakukan system otonomi pada masa orde bar, tepatnya tahun 1996. Penerapan otonomi membuka peluang bagi daerah-daerah di Indonesia dalam memajukan wilayahnya masing-masing. Melalui otonomi, pemerintah daerah memiliki kebebasan dalam merancang strategi pembangunan demi kesejahteraan masyarakat serta efektivitas pemerintahan di bidang ekonomi, sosial, dan politik.

Seiring dengan perkembangannya, konsep otonomi tidak hanya diterapkan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, tetapi juga meluas hingga ke tingkat desa. Hal ini tercermin dari adanya pengakuan resmi terhadap otonomi desa yang pertama kali dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, keberadaan desa sebagai entitas yang memiliki kewenangan otonom diperkuat secara lebih mendalam melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selama ini, desa kerap dipandang wilayah yang tertinggal dibandingkan kelurahan, bahkan banyak desa yang memilih beralih status menjadi kelurahan demi memperoleh citra yang lebih tinggi. Namun, perubahan ini dikhawatirkan dapat menggerus eksistensi desa yang merupakan bagian penting dalam menjaga kearifan lokal, budaya, dan struktur sosial

tradisional. Oleh karena itu, pemerintah pusat berupaya mengubah paradigma tersebut dengan memberikan hak sepenuhnya kepada desa untuk mengatur serta menjalankan urusan pemerintahan secara mandiri.

Sebagai wilayah otonom, desa bertanggung jawab dalam menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan mandiri. Walaupun **UU No. 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat (1) dan (4)** menjamin alokasi dana desa dari **APBN** sebesar kurang lebih satu miliar rupiah setiap tahun, desa tidak boleh bergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah. Sebelum adanya kebijakan dana desa, pemerintah desa harus berjuang secara mandiri untuk memperoleh pendapatan demi kelangsungan pengembangan dan penyelenggaraan layanan bagi masyarakat.

Oleh karena itu, desa perlu menggali dan memanfaatkan potensi lokal, baik dalam bentuk **Sumber Daya Alam (SDA)** maupun **Sumber Daya Manusia (SDM)**, untuk meningkatkan **Pendapatan Asli Desa (PADes)**. Hasil dari pendapatan ini harus dikelola dengan baik agar dapat digunakan secara optimal untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan administrasi, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

Karena sebagian besar desa masih bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan daerah, pengelolaan keuangan desa harus disusun secara strategis dan profesional. Salah satu upaya pemerintah dalam membantu desa mengembangkan ekonomi dan keuangannya adalah melalui pembentukan **BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)**, sebagaimana diatur dalam **UU No. 32 Tahun 2004**, dan diperkuat oleh **Permendagri No. 39 Tahun 2010** tentang BUMDes.

BUMDes bertujuan menjadi penggerak ekonomi lokal, menggali potensi desa, memenuhi kebutuhan masyarakat, serta membuka lapangan kerja. Melalui interaksi ekonomi antara pemerintah desa dan masyarakat, BUMDes mendorong terwujudnya kemandirian desa serta menurunkan angka kemiskinan. BUMDes memiliki konsep yang serupa dengan **BUMN (Badan Usaha Milik Negara)** dan **BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)**, meskipun skalanya lebih kecil dan terbatas pada lingkup desa.

Peran pemerintah daerah sangat krusial dalam mendorong keberhasilan BUMDes. Berdasarkan **Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021** tentang BUMDes, **Pasal 22 ayat (1) dan (2)** mengatur bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib melakukan sosialisasi, pelatihan teknis, pengembangan SDM, manajemen, serta menyediakan fasilitas akses permodalan bagi BUMDes. Namun kenyataannya, masih ada pemerintah daerah yang kurang aktif memberikan dukungan sebagaimana mestinya. Contohnya, di Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, BUMDes belum sepenuhnya mendapat dukungan dari pemerintah daerah, yang menyebabkan perkembangan BUMDes kurang optimal.

Dengan demikian, untuk mewujudkan kemandirian desa yang sejati, dibutuhkan sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pemerintah daerah. Desa tidak hanya membutuhkan dana, tetapi juga pembinaan, pelatihan, serta pendampingan yang berkelanjutan agar mampu menjalankan fungsi otonominya secara efektif dan berkelanjutan.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian menerapkan teknik pencacatan data melalui tahap pengamatan langsung, Tanya jawab dan bukti tertulis. Menurut Young dan Schmidt (dalam Harbani Pasolong, 2016:131) menyatakan bahwa pengamatan langsung ialah observasi terstruktur tentang kejadian-kejadian yang terlihat. Menurut Esterberg (dalam Sugiyono 2019:304) menjelaskan Tanya jawab adalah diskusi antara dua individu guna saling tukar menukar berita dan pemikiran melalui wawancara."Bukti tertulis berdasarkan Sugiyono (2019:239) ialah sebuah teknik yang diterapkan untuk mendapatkan bukti berupa jurnal, dokumen dan berkas, gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung sebuah penelitian.

Pengkajian ini memfokuskan analisis implementasi program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menganalisis permasalahan tersebut, peneliti mengadopsi teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edwards III (dalam Leo Agustino, 2016:136-141), yang menyatakan bahwa ada empat indikator utama yang memberikan pengaruh pada efektivitas implementasi kebijakan, yaitu: Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Teknik analisis informasi menurut Creswell (2017:276-284) ada 4 tahapan yakni membuat, menyiapkan informasi guna diteliti, memahami semua informasi, menganalisis lebih mendalam menggunakan penandaan isi data, menginterpretasi atau memaknai data. Menguji keakuratan informasi bisa melalui metode perluasan waktu, pengamatan langsung, pengembangan ketentuan pada kajian, perbandingan data, bertukar pikiran dengan teman peneliti, evaluasi kasus yang tidak berhasil dan membercheck. (Sugiyono, 2021: 562-570)

PEMBAHASAN

A. Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Teluk Sari Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Untuk memahami bagaimana pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Teluk Sari, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, peneliti menggunakan konsep implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edwards III sebagaimana dikutip dalam Leo Agustino (2016:136–141). Dalam pandangan tersebut, terdapat empat faktor utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi

Pencapaian implementasi peraturan meminta untuk implementer memahami yang mana mesti dikerjakan. Yang mana menjadi arah aturan perlu disebarkan untuk perkumpulan target (target grup) oleh karena itu kelak menurunkan penyimpangan implementasi. Jika arah dan terget salah aturan, tidak pasti ataupun belum diketahui sepenuhnya dari pihak yang dituju. Sehingga peluang terjadinya hambatan dari target yang dituju.

Ditemukan tiga tolak ukur yang digunakan untuk menghitung pencapaian komponen komunikasi terkait diatas, yaitu:

1. Transmisi; penyampaian komunikasi yang efektif akan berdampak positif terhadap keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Namun, permasalahan yang kerap muncul dalam proses penyampaian ini adalah kesalahpahaman atau miskomunikasi. Hal tersebut sebagian besar disebabkan oleh komunikasi yang harus melewati beberapa lapisan birokrasi, sehingga informasi yang diharapkan sering kali mengalami distorsi di tengah proses penyampaian. Menurut informasi dari Tanya jawab dan pengamatan langsung yang dilaksanakan, maka ditarik kesimpulan dalam hal ini tahapan komunikasi antara Pemerintah Dusun, pengelola BUMDes, dan masyarakat di Desa Teluk Sari belum sepenuhnya berjalan secara efektif dan merata. Meskipun koordinasi internal antara pemerintah desa dan pengelola BUMDes telah terjalin dengan cukup baik, penyampaian informasi kepada masyarakat masih minim dan belum dilakukan secara terbuka serta sistematis.
2. Kejelasan; informasi yang diperoleh melalui pelaksanaan tata cara mesti sesuai dengan aturan yang ada. ketidakpastian aturan kadang-kadang menghambat implementasi, tingkatan, penanggung jawab pelaksana aturan. Menurut informasi dari Tanya jawab dan pengamatan langsung dapat disimpulkan bahwa komunikasi dan penyampaian informasi dari Pemerintah Desa Teluk Sari kepada pelaksana program BUMDes telah berjalan dengan baik, ditandai dengan kejelasan dan kemudahan pemahaman yang mendukung efektivitas pelaksanaan tugas para staf di lapangan.
3. Konsistensi; instruksi yang disampaikan dalam suatu proses komunikasi harus disusun secara konsisten dan jelas agar dapat dilaksanakan dengan baik. Apabila arahan sering berubah-ubah, hal ini bisa menimbulkan kebingungan di tingkat pelaksana. Berdasarkan

hasil wawancara dan observasi langsung, peneliti menyimpulkan bahwa tingkat konsistensi dalam pemberian instruksi oleh pemerintah desa kepada pelaksana Program BUMDes di Desa Teluk Sari tergolong cukup baik. Konsistensi ini diperkuat dengan adanya komunikasi yang terbuka antara pemerintah desa dan para pelaksana, sehingga mereka dapat menjalankan tugas secara terarah dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Sumber Daya

Meskipun suatu kebijakan telah disampaikan dengan jelas dan konsisten, implementasinya tidak akan berjalan secara optimal jika para pelaksana kekurangan sumber daya. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, seperti kompetensi dari pelaksana kebijakan, serta sumber daya keuangan. Ketersediaan sumber daya merupakan elemen krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan tersebut hanya akan menjadi dokumen tertulis tanpa realisasi di lapangan.

1. Staf, sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan merupakan pegawai.ketidak berhasilan yang kerap muncul saat penerapan peraturan antara lain disebabkan dari pegawai yang tidak sesuai keahliannya Penambahan jumlah staf dan pelaksana saja tidaklah memadai; yang lebih penting adalah memastikan bahwa staf tersebut memiliki keahlian dan kemampuan yang sesuai (kompeten dan kapabel) untuk menjalankan kebijakan atau melaksanakan tugas yang telah ditetapkan secara efektif..Menurut informasi dari Tanya jawab dan pengamatan langsung, dan arsip lapangan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tingkat kedisiplinan dan kompetensi staf BUMDes Teluk Sari masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian latar belakang keahlian staf dengan bidang usaha yang dijalankan, sehingga berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Informasi; inti implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu:
 - a) Informasi yang bersangkutan menggunakan aturan yang ditetapkan. Pelaksana perlu memahami tugas yang diberikan oleh pimpinan.
 - b) Informasi tentang fakta kepatuhan oleh pihak pimpinan sesuai dengan peraturan yang diberlakukan. Pelaksana mesti memahami benarkah ada individu lain yang ikut serta dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh dengan aturan.

Menurut informasi dari Tanya jawab dan pengamatan langsung, pencari informasi menyimpulkan bahwa kesesuaian informasi yang diberikan oleh pemerintah desa kepada para pelaksana program BUMDes Teluk Sari sudah berjalan dengan baik. Informasi tersebut mencakup tata cara pelaksanaan, aturan yang berlaku, serta pembagian tugas yang harus dijalankan oleh para staf pelaksana, sehingga dapat mendukung efektivitas program secara keseluruhan.

3. Wewenang; secara umum, kewenangan perlu bersifat formal agar instruksi dapat dijalankan dengan efektif. Wewenang memberikan otoritas atau legitimasi kepada pelaksana untuk mengeksekusi kebijakan yang telah ditetapkan secara politis. Apabila kewenangan tersebut tidak ada, maka para pelaksana akan kehilangan legitimasi di mata publik, yang pada akhirnya dapat menghambat proses pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan kewenangan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. oleh para pelaksana program BUMDes Teluk Sari saat ini masih kurang optimal. Hal tersebut disebabkan oleh ketidaksesuaian antara wewenang yang dijalankan dengan aturan yang berlaku, serta belum tercapainya kesesuaian antara tugas dan fungsi masing-masing pelaksana dalam struktur organisasi BUMDes.

4. Fasilitas; Fasilitas fisik merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Meskipun pelaksana memiliki jumlah staf yang memadai, memahami tugasnya dengan baik, serta memiliki kewenangan untuk menjalankan kebijakan, namun tanpa adanya sarana dan prasarana yang mendukung, maka pelaksanaan kebijakan tersebut tetap tidak akan berjalan secara efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola, observasi langsung di lapangan, dan dokumentasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fasilitas fisik dan sarana pendukung pada unit usaha penjualan alat tulis kantor (ATK) BUMDes Teluk Sari masih belum memadai. Ketiadaan rak, lemari, dan meja display yang layak menyebabkan penataan barang menjadi tidak teratur dan kurang menarik secara visual. Selain itu, ketersediaan stok dan variasi produk yang terbatas menunjukkan belum optimalnya sistem pengelolaan usaha.

3. Disposisi

Disposisi merujuk pada sifat dan karakter yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, dan sikap demokratis. Jika implementor memiliki disposisi yang positif, maka pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan sesuai dengan tujuan dan harapan pembuat kebijakan. Namun, apabila pelaksana memiliki sikap atau pandangan yang bertentangan dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi akan cenderung mengalami hambatan dan menjadi kurang efektif. Variabel disposisi ada dua, yaitu:

1. Pengangkatan birokrasi; sikap atau disposisi para pelaksana dapat menjadi kendala nyata dalam implementasi kebijakan apabila individu yang ditugaskan tidak menjalankan kebijakan sebagaimana yang diharapkan oleh para pejabat tinggi. Oleh karena itu, dalam proses pemilihan dan pengangkatan pelaksana kebijakan, penting untuk memilih orang-orang yang memiliki komitmen dan dedikasi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, khususnya yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Menurut informasi dari Tanya jawab dan pengamatan langsung, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya pengangkatan birokrasi di BUMDes Teluk Sari masih belum sepenuhnya mengedepankan prinsip profesionalisme dan komitmen kerja. Sikap dan etos kerja staf menunjukkan masih adanya kekurangan dalam hal tanggung jawab, kedisiplinan, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini berdampak langsung pada kurang optimalnya pelaksanaan program-program BUMDes dan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, diperlukan langkah evaluasi terhadap proses rekrutmen serta peningkatan kapasitas dan pembinaan staf secara berkelanjutan.

2. Insentif; Menurut Edward, salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengatasi kecenderungan sikap para pelaksana adalah dengan mengatur insentif. Karena pada dasarnya individu cenderung bertindak berdasarkan kepentingan pribadi, maka pemberian insentif oleh pembuat kebijakan dapat memengaruhi perilaku para pelaksana. Dengan menambahkan manfaat atau beban tertentu, insentif tersebut dapat menjadi dorongan yang mendorong pelaksana kebijakan untuk bertindak sesuai dengan tujuan kebijakan, sekaligus tetap memenuhi kepentingan pribadi atau organisasinya. Menurut informasi dari Tanya jawab dan pengamatan langsung yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa sistem pemberian insentif kepada para pelaksana Program BUMDes Teluk Sari masih belum optimal. Hal ini tercermin dari besaran gaji yang diterima, yang dinilai belum sepadan dengan beban dan tanggung jawab pekerjaan yang mereka emban. Gaji yang diberikan juga masih berada di bawah standar umum pengupahan yang berlaku, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pelaksana. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi

kebijakan insentif secara menyeluruh guna memastikan bahwa sistem kompensasi yang diterapkan mampu mencerminkan prinsip keadilan, meningkatkan motivasi kerja, serta mendukung efektivitas pelaksanaan program BUMDes secara berkelanjutan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang menjalankan kebijakan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan implementasinya. Salah satu elemen kunci dalam struktur organisasi adalah keberadaan prosedur operasional standar (SOP), yang berfungsi sebagai acuan bagi setiap pelaksana dalam bertindak. Namun, struktur organisasi yang terlalu berjenjang dapat melemahkan efektivitas pengawasan dan menimbulkan birokrasi yang berbelit-belit atau *red-tape*. Kondisi ini pada akhirnya membuat kegiatan organisasi menjadi kurang fleksibel dan sulit bergerak secara efisien. Variabel struktur birokrasi, yaitu:

- 1) SOP merupakan serangkaian aktivitas rutin yang memandu pegawai, pelaksana kebijakan, administrator, atau birokrat dalam menjalankan tugas sehari-hari sesuai dengan standar yang telah ditentukan, atau setidaknya memenuhi standar minimum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menurut informasi dari Tanya jawab dan pengamatan langsung, dan dokumentasi, peneliti menyimpulkan bahwa penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan program BUMDes di Desa Teluk Sari telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan melalui kesesuaian pelaksanaan tugas para pelaksana dengan SOP yang telah ditetapkan, sehingga memudahkan mereka dalam menjalankan tugas serta menjadi acuan yang jelas dalam pelaksanaan program BUMDes di desa tersebut.
- 2) Sedangkan pelaksanaan pembagian ialah usaha perkembangan kewenangan, tugas-tugas ataupun tindakan-tindakan staf diantara sejumlah kelompok kerja.

Menurut informasi dari Tanya jawab dan pengamatan langsung yang dilakukan, pencari informasi disimpulkan bahwa perkembangan kewajiban dalam pelaksanaan program BUMDes di Desa Teluk Sari telah dilakukan dengan cukup baik. Namun, para staf pelaksana belum sepenuhnya menunjukkan tanggung jawab yang optimal terhadap tugas masing-masing. Hal ini disebabkan oleh kurangnya komitmen dan belum adanya totalitas dalam menjalankan peran mereka sebagai implementor program BUMDes.

A. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Teluk Sari Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Berdasarkan penelitian ditemukan faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Teluk Sari Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara:

1. Faktor Penghambat

Faktor penghambat meliputi kurangnya kompetensi staf karena tidak sesuai dengan bidangnya, serta fasilitas fisik yang masih minim seperti rak, lemari, dan stok perlengkapan kerja yang kurang lengkap. Hal ini berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat pelaksanaan program BUMDes di Desa Teluk Sari antara lain adalah masih rendahnya kemampuan staf pelaksana dalam menjalankan tugas dengan baik. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara bidang tugas dengan latar belakang keahlian masing-masing staf. Selain itu, fasilitas yang tersedia di BUMDes Teluk Sari juga masih belum memadai. Hal ini terlihat dari keterbatasan sarana pendukung seperti lemari, rak, dan meja untuk menata produk yang dijual. Stok barang alat tulis kantor (ATK) juga masih

terbatas, baik dari segi jumlah maupun variasi merek, sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

Faktor pendukung meliputi lokasi BUMDes yang strategis dan jenis usaha yang dikelola cukup sesuai dengan potensi desa, terutama karena banyak warga yang berstatus pelajar dan mahasiswa. Selain itu, implementasi program telah berjalan sesuai dengan SOP yang ditetapkan, dan sebagian besar staf juga sudah mulai menerapkannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendukung implementasi program BUMDes di Desa Teluk Sari. Pertama, lokasi BUMDes yang strategis, yaitu berada di samping Kantor Desa Teluk Sari dan di tepi jalan raya, memudahkan akses masyarakat terhadap layanan usaha yang disediakan. Kedua, jenis usaha yang dijalankan oleh BUMDes, yaitu penyediaan alat tulis kantor (ATK), dinilai sesuai dengan potensi lokal desa, mengingat sebagian besar masyarakatnya masih berstatus sebagai pelajar dan mahasiswa. Ketiga, implementasi program BUMDes telah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, sehingga mendukung kelancaran dan ketertiban dalam operasional unit usaha. Keselarasan antara jenis usaha yang dijalankan dengan kebutuhan masyarakat lokal menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan program BUMDes di Desa Teluk Sari.

SIMPULAN

1. Implementasi Program BUMDes di Desa Teluk Sari Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara masih belum terlaksana secara maksimal. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa indikator penting:

Pada aspek komunikasi, disimpulkan bahwa komunikasi internal antara Pemerintah Desa dan pelaksana program BUMDes di Desa Teluk Sari telah berjalan cukup baik. Arahan yang diberikan tergolong konsisten dan didukung oleh keterbukaan komunikasi, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan tujuan.

Namun, komunikasi eksternal kepada masyarakat masih minim, tidak merata, dan belum dilakukan secara terbuka maupun sistematis. Hal ini berdampak pada rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap program BUMDes. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi publik yang lebih terbuka, partisipatif, dan berkelanjutan untuk mendukung keberhasilan pengelolaan BUMDes.

Pada aspek sumber daya, masih ditemukan sejumlah kendala. Kompetensi staf pelaksana belum sesuai dengan bidang tugas yang dijalankan, sehingga mengurangi efektivitas pelaksanaan program. Walau informasi dari pemerintah desa sudah sesuai dan mendukung pelaksanaan, namun pelaksana belum sepenuhnya mampu menjalankan wewenangnya secara tepat. Di sisi lain, fasilitas pendukung seperti rak, lemari, meja, serta stok ATK masih sangat terbatas dan kurang memadai.

Pada aspek disposisi atau sikap pelaksana, ditemukan bahwa komitmen dan dedikasi mereka terhadap tugas masih rendah, yang menunjukkan bahwa proses pengangkatan birokrasi belum didasarkan pada kesiapan dan motivasi kerja. Meski begitu, insentif yang diberikan sudah cukup baik, namun masih belum sesuai dengan standar gaji pada umumnya.

Pada aspek struktur birokrasi, program sudah memiliki SOP yang jelas dan pelaksanaannya juga telah mengikuti prosedur tersebut. Tanggung jawab telah dibagikan, namun pelaksana masih belum mampu menjalankan tugas secara optimal sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program BUMDes di Desa Teluk Sari terbagi menjadi faktor penghambat dan pendukung.

Faktor penghambat meliputi kurangnya kompetensi staf karena tidak sesuai dengan bidangnya, serta fasilitas fisik yang masih minim seperti rak, lemari, dan stok perlengkapan kerja yang kurang lengkap. Hal ini berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan program.

Faktor pendukung meliputi lokasi BUMDes yang strategis dan jenis usaha yang dikelola cukup sesuai dengan potensi desa, terutama karena banyak warga yang berstatus pelajar dan mahasiswa. Selain itu, implementasi program telah berjalan sesuai dengan SOP yang ditetapkan, dan sebagian besar staf juga sudah mulai menerapkannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Affrian, R. and Jumaidi, J. (2025) 'Partisipasi Masyarakat Sebagai Penentu Efektivitas Kebijakan Kebersihan Pasar Di Amuntai Tengah', *Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 9(1), pp. 109–126.

Anonim. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.39 tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Agung Septian Wijanarko.2018.*Peran Badan Usaha Milik Desa(Bumdes)dalam pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pandankerajan Kecamatan Kemilagi kabupaten Mojokert*.Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Pembangunan Nasional Veteran Skripsi.

Angger Sekam Manikam.2018 *Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa di Desa NgepossariKecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul*.Jurusan Ilmu Pemerintahan FISOPOL Universitas Muhammadiyah Yokyakarta.Skripsi.

Agustino, Leo, Ph.D. 2016. *Dasar-dasar aturan public* (Edisi Refesi). Bandung:Alfabeta

Agustino, Leo. (2017). *Dasar-dasar peraturan publik*. Bandung: CV. Alfabeta.

Anggara,Sahya. 2016. *Ilmu Administrasi Negara*.Bandung:CV Pusta Setia.

Hamdi, Muchlis. 2015.*Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Hidayatullah, G.M. and Mahpuzah, A. (2025) 'Pengelolaan Pasar Mebel Muara Tapus pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Administraus*, 9(2), pp. 26–33.



Mulayadi, Deddy. 2016. *Study Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*. Bandung Alfabeta

Prof. Said Zainal Abidin, 2016, *Kebijakan Publik*, Jakarta Selatan: Salemba Humanika

Setiawan, I. (2025) 'Fenomena Penggunaan Sepeda Listrik di Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Niara*, 18(1), pp. 323–327.

Sugiyono, 2016. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.